

**PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK  
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang  
terdaftar di KPP Pratama Bulukumba)**

**SKRIPSI**



**NIA WAHYUNI  
105731109320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN**

**PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP**

**PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK**

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang  
terdaftar di KPP Pratama Bulukumba)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**NIA WAHYUNI**

**NIM : 105731109320**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas*

*Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah...  
(QS. Ali ‘Imran, 160)**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin.**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada Cinta Pertama dan Pintu Surga saya yaitu Kedua Orang Tua saya, Teman – teman yang telah kebersamai dan memberikan motivasi.**

### **KESAN DAN PESAN**

**Kesan : Dalam Proses penyelesaian skripsi ini banyak hal yang membuat saya sadar akan hal-hal baru yang belum saya dapatkan sebelumnya, hingga permasalahan di setiap pengerjaannya membuat saya sadar bahwa Sesudah Kesulitan itu ada Kemudahan.**

**Pesan : Skripsi ini tidak akan pernah selesai jika dianggurkan saja, Tetap mengerjakan walaupun hanya menulis beberapa kata saja.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap peningkatan Kepatuhan Pajak ( Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba)  
Nama Mahasiswa : Nia Wahyuni  
No.Stambuk/NIM : 105731109320  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Univesitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

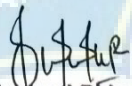
Makassar, 20 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Saida Said, S.E., M.Ak**  
NIDN: 0910097203

  
**Dr. Mukminatir Ridwan, SE., M.Si**  
NIDN: 0919017901

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis  
**Dr. H. Andi Jamnan, S.E., M.Si**  
BM: NBM: 651 607

Ketua Program Studi

  
**Mira, S.E., M.Ak., Ak**  
NBM: NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl Sultan Alauddin No 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama : Dewi Cahyani, Nim : 105731107820 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/62201/091004/2024 Tanggal 14 Muharram 1446 H/ 20 Juli 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Muharram 1446 H  
20 Juli 2024 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif khalid, S.E., M.Si., Ak., CA   
2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, S.E., M.Ak   
3. Mutiarni, S.E., M.Si  
4. Mira, SE., M.Ak., Ak

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM. 651 507



**FAKULTASEKONOMIDANBISNIS**  
**UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR**  
Jl Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nia Wahyuni  
Stambuk : 105731109320  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Peerpajakan terhadap peningkatan Kepatuhan Pajak ( Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba)

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

  
**Nia Wahyuni**  
NIM: 105731109320

Diketahui Oleh,

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis  
**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

  
**Mira, S.E., M.Ak., Ak**  
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Wahyuni  
Stambuk : 105731109320  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap peningkatan Kepatuhan Pajak  
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama  
Bulukumba)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
  
**Nia Wahyuni**  
NIM: 105731109320

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Syukur tiada henti penulis limpahkan kepadanya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini sampai pada tahap skripsi yang berjudul “PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bulukumba)”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis Bapak Tato Manai dan Ibu Indo Jua yang senantiasa memberikan dukungan, harapan, perhatian, kasih sayang serta doa tulus kepada penulis. Orang – orang terdekat serta teman - teman tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak saya sampaikan kepada:

1. Allah swt yang telah membuka jalan dan mempermudah segala urusan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



2. Diri saya sendiri yang telah berani memulai ini semua dari awal hingga di penghujung tugas akhir ini.
3. Untuk Cinta pertamaku Bapak Tato Manai dan Pintu Surgaku ibu Indo Jua terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan dorongan serta doa yang selalu di berikan
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Saida said, SE., M.Ak selaku Pembimbing I yang suda senantiasa mengarahkan dan meluangkan waktunya membimbing penulis hingga Skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
8. Ibu Dr. Mukminati Ridwan, SE.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan berkenan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak/Ibu dan Asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
10. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Saudara – saudara seperjuangan PILAR XX (Welang, angler, Salamander, Lobster, Pesut, Tekukur, Gelada, Panther, Anaconda dan Cicadas)

Pemerhati Alam dan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan dukungan dan Semangat.

12. Nurul Aini L, Fenti Nurjayanti, Misykatul Munirah Terima Kasih telah menjadi teman seperjalanan penulis, meskipun langkah kaki kita menuju tempat yang berbeda, percayalah kalian adalah manusia terbaik yang pernah penulis temui.

13. Penghuni kelas AK20C dan PA20A Yang telah menjadi bagian dari kisah perkuliahan penulis.

14. Penghuni Hartaco Blok 3R/12 yang sudah menghibur dan membersamai.

15. Semua Kerabat yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah mendukung pembuatan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kepada semua pihak pembaca senantiasa memberikan saran maupun kritikan yang bersifat membangun agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabuqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2024

**Penulis**

## ABSTRAK

**NIA WAHYUNI. 2024. *Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bulukumba)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Saida Said dan Mukminatid Ridwan.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan Modernisasi Perpajakan pada lingkungan KPP Pratama Bulukumba dan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel yang digunakan sebanyak 98 Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba Data penelitian ini diambil dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dalam menganalisis variabel – variabelnya. Hasil penelitian analisis regresi linear sederhana ini menunjukkan modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Modernisasi perpajakan, Kepatuhan pajak.

## **ABSTRACT**

**NIA WAHYUNI. 2024. *The Effect of Tax Modernization on Tax Compliance (Case Study on Individual Taxpayers at KPP Pratama Bulukumba). Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: Saida Said and Mukmminati Ridwan.***

*The purpose of this study is to find out an overview of the implementation of Tax Modernization in the Bulukumba Pratama KPP environment and to find out the influence of Tax Modernization on tax compliance. This type of research uses a quantitative research method with an associative approach. The sample used was 98 individual taxpayers registered at KPP Pratama Bulukumba Data for this study was taken from the distribution of questionnaires using non-probability sampling techniques. This study data analysis uses simple regression analysis in analyzing the variables. The results of this simple linear regression analysis show that tax modernization has a positive and significant effect on tax compliance.*

**Keywords:** *Tax modernization, Tax compliance.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Teori Atribusi .....	7
2. Pajak .....	8
3. Fungsi Pajak .....	9
4. Jenis-jenis Pajak .....	10
5. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
6. Asas Pemungutan Pajak.....	12
7. Teori – teori yang mendukung Pemungutan Pajak.....	13
8. Reformasi perpajakan .....	15
9. Modernisasi Perpajakan. ....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pikir. ....	30
D. Hipotesis .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	33
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Teknik pengumpulan data .....	35
E. Definisi Operasional Variabel .....	36
F. Metode Analisis Data .....	39
G. Uji Hipotesis .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Sejarah KPP Pratama Bulukumba.....	45
2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba.....	47
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bulukumba .....	48
4. <i>Job Description</i> .....	48
B. Karakteristik Responden .....	51
C. Uji Kualitas Data .....	56
1. Uji Validitas .....	56
2. Uji Reliabilitas.....	58
D. Analisis Uji Asumsi Klasik .....	58
1. Uji Normalitas.....	58
2. Uji Heteroskedastisitas .....	59
E. Analisis Statistik Deskriptif.....	60
F. Metode analisis data .....	65
1. Pengujian Hipotesis.....	65
2. Uji Parameter Individual (Uji statistik t) .....	66
3. Koefisien Determinasi .....	67
G. Pembahasan Hasil Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3 1 Item Skor Responden .....	35
Tabel 3 2 Definisi Operasional Variabel .....	38
Tabel 4 1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia .....	53
Tabel 4 3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat pendidikan .....	54
Tabel 4 4 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan.....	54
Tabel 4 5 Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kepemilikan NPWP .....	55
Tabel 4 6 Uji Validitas Variabel X.....	57
Tabel 4 7 Uji Validitas Variabel Y .....	57
Tabel 4 8 Uji Reliabilitas .....	58
Tabel 4 9 Uji Normalitas.....	59
Tabel 4 10 Uji Heteroskedastisitas.....	60
Tabel 4 11 Uji Statistik Deskriptif .....	61
Tabel 4 12 Uji Analisis Deskriptif Struktur organisasi .....	61
Tabel 4 13 Uji Analisis Deskriptif Prosedur organisasi .....	62
Tabel 4 14 Uji Analisis Deskriptif Strategi organisasi.....	63
Tabel 4 15 Uji Analisis Deskriptif Budaya organisasi.....	63
Tabel 4 16 Uji Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak.....	64
Tabel 4 17 Uji Hipotesis .....	65
Tabel 4 18 Uji Statistik t .....	67
Tabel 4 19 Uji Determinasi.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 3 1 Struktur organisasi KPP Pratama Bulukumba .....	48





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi Negara Republik Indonesia, Pembayaran pajak menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap sebagai tulang punggung sumber daya keuangan nasional dalam konteks keberhasilan program pembangunan nasional yang secara bertahap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat secara keseluruhan (Henny Zurika Lubis, 2019).

Pajak adalah iuran wajib atau sumbangan wajib kepada negara yang bersifat wajib, yang ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum (Surya & Putra, 2022). Tujuan pajak itu sendiri adalah untuk meningkatkan penumbuhan sumber daya manusia (SDM), Infrastruktur negara demi tercapainya kemakmuran Masyarakat, serta peran pajak yang begitu dominan terhadap kehidupan sehari-hari (Pernamasari & Syifa Nur Rahmawati, 2021). Permasalahan yang serius dalam dalam pengumpulan penerimaan pajak ialah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia, wajib Pajak dapat dianggap taat apabila mampu dan telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan memahami segala peraturan perundang-undangan tentang perpajakan padahal Direktorat jenderal pajak telah melakukan reformasi perpajakan demi

menumbuhkan rasa kesadaran akan pajak kepada wajib pajak (Wahyuni et al., 2020).

Reformasi perpajakan sendiri sebenarnya dimulai pada tahun 1983, dimana perubahan pertama adalah perubahan sistem pemungutan pajak yakni dipungut dengan menggunakan sistem *Official assesment* diubah menjadi sistem pemungutan *self assesment* dimana sistem pemungutan *self assesment* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan dan keyakinan penuh kepada wajib pajak dalam menentukan besar pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Salah satu alasan dilakukannya reformasi perpajakan pada saat itu adalah karena pajak pada masa lalu terdapat campur tangan pemerintah kolonial yang mengambil alih pemungutan pajak yang dinilai pemungutan pajak pada saat itu tidak sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila (Putri & Najicha, 2021). Reformasi perpajakan tetap terjadi di tahun 2001 dimana Direktorat jenderal pajak kembali melakukan kesepakatan untuk memperbaharui program kebijakan dan keuangan salah satunya ialah perbaikan perpajakan (Putri & Najicha, 2021).

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut dengan modernisasi. Konsep Modernisasi perpajakan merupakan upaya untuk lebih menambah efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, seiring dengan berkembangnya globalisasi (Zuhdi Imam Muhammad, 2019). Modernisasi perpajakan juga mengikuti kemajuan teknologi serta didukung

dengan penerapan peraturan umum sehingga dapat menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih efektif (Rusli, 2019). Kode Etik Pegawai Otoritas Pajak mengatur perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*), sehingga direktorat jenderal pajak menjalankan sistem perpajakan secara modern (Hernando & Wahyudin, 2020).

Sistem Modernisasi perpajakan modern yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam mengajukan dan membayar pajak, dengan keunggulan tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengajukan dan melaporkan SPTnya (Septiliani & Ismatullah, 2019). Direktorat Jenderal Pajak membentuk Tim Modernisasi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan melalui keputusan menteri keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 tentang tugas atau kegiatan pokok adalah:

1. Memodernisasi Kelembagaan termasuk Struktur Organisasi, Strategi, prosedur dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya.
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib pajak dan administrasi perpajakan lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan- perubahan meliputi modernisasi di bidang Struktur organisasi, dengan adanya posisi *Account*

*Representative (AR)* yang bertugas memberikan bantuan dan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru serta mengawasi Kepatuhan wajib pajak. Modernisasi di bidang Prosedur organisasi berhubungan dengan Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, Inovasi proses dan Perubahan metode operasi dan informasi. Modernisasi di bidang Strategi Organisasi meliputi dukungan teknologi informasi modern, pengambilan keputusan berdasarkan *Standar Operating Procedure*, dan Ketentuan perpajakan. Modernisasi di bidang Budaya organisasi meliputi penerapan kode etik terhadap pegawai DJP, Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional dan penyempurnaan sistem manajemen SDM (Robi Maulana M, 2022).

Fenomena yang sering muncul dalam meningkatkan kepatuhan pajak kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak yang belum dibayar, kecenderungan membayar kewajiban pajak kurang dari yang diperlukan, Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang- undang maupun

secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai modernisasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak yang berada di kabupaten Bulukumba dengan judul penelitian : **“Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bulukumba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi perpajakan terhadap kantor pelayanan pajak bulukumba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1). Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat

dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

## 2). Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari sudut pandang wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak sehingga dapat memberikan masukan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Menurut Fritz Heider, pendiri teori atribusi, teori ini menjelaskan perilaku manusia dan juga menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab dan motivasi perilaku seseorang. Kepatuhan perpajakan mengacu pada sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat suatu penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Fritz Heider menunjukkan bahwa kekuatan internal (atribusi individu, seperti kemampuan dan usaha) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan, seperti peraturan) bersama-sama menentukan perilaku manusia. Perilaku yang dihasilkan secara internal adalah perilaku yang dianggap berada dalam kendali individu, sedangkan perilaku yang dihasilkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku yang terpaksa dilakukan oleh seseorang sebagai akibat dari keadaan di mana ia dipaksa bertindak. Apabila dengan adanya penerapan modernisasi sistem perpajakan ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka persepsi wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi secara eksternal. Namun, jika tidak adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan adanya penerapan sistem perpajakan modern, maka persepsi wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh kondisi secara internal.

## 2. Pajak

Pajak memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara. Sumber utama pendapatan pemerintah adalah pajak, yang jumlahnya sekitar 70% dari seluruh pendapatan pemerintah. Maka dari itu dengan adanya pajak diharapkan mampu mengembangkan negara Indonesia kedepannya (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Pajak adalah aliran rakyat ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai bukti kesungguhan dan keikutsertaan rakyat dalam membiayai negara dan pembangunan nasional Pajak bersifat memaksa dalam pemungutannya (Meliala & Widianti, 2008). Menurut peraturan yang ditetapkan dalam pemungutan pajak bersifat dipaksakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 28 Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran wajib oleh orang pribadi dan masyarakat yang bersifat memaksa, dan imbalan dari pembayaran tersebut tidak diberikan secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan pemerintah dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan rakyat. (Hidayat et al., 2019)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang pemungutan bersifat memaksa dan pemungutannya telah diatur oleh peraturan perundang – undangan. Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung. Berdasarkan definsi tersebut (Niru & Sinaga, 2016) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Iuran dari Rakyat kepada Negara



luran yang dimaksud berupa uang dan bukan barang, yang berhak melakukan pemungutan pajak ialah negara.

b) Berdasarkan Undang – undang

Pajak telah diatur oleh undang – undang serta pelaksanaannya juga sesuai dengan undang – undang.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.

d) Pajak ditujukan untuk keperluan negara

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kepentingan negara yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

### 3. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh kepentingan negara, sehingga pajak mempunyai peranan yang luas khususnya kepada negara. (Sihombing & Sibagariang, 2020) Fungsi pajak dibagi menjadi 4 yaitu:

a) Fungsi anggaran (*Budgeter*)

Pajak memberikan sumber penghasilan fiskal bagi pemerintah dengan mengumpulkan dana dari pembayar pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan kepentingan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan tujuannya

adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara.

b) Fungsi Mengatur (*Regulasi*)

Pajak ialah sarana pelaksanaan atau harmonisasi kebijakan negara di bidang ekonomi maupun sosial, mengatur dan melaksanakan kebijakan, dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

c) Fungsi Pemerataan (*Distribusi*)

Pajak ditekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat apabila pajak yang disalurkan oleh masyarakat dapat berdampak positif terhadap perekonomian.

d) Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu wujud sistem gotong royong untuk memajukan kesejahteraan negara.

#### 4. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dibagi atas berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya (Resmi, 2013)

a) Menurut Golongannya, terdiri dari:

- 1) Pajak langsung ialah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak tidak langsung ialah pajak yang tidak dapat dipungut secara tetap, melainkan hanya pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan tertentu yang

menimbulkan kewajiban perpajakan. Pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).

b) Menurut Lembaga atau Instansi pemungut terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah ialah Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan rumah tangga daerah. Contohnya Pajak daerah tingkat 1 seperti Pajak kendaraan bermotor dll, adapun pajak daerah tingkat 2 seperti Pajak pembangunan dll.
- 2) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta digunakan untuk pembiayaan negara. Contohnya Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dll.

c) Menurut Sifatnya terdiri dari:

- 1) Pajak objektif ialah pajak yang dibayarkan berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
- 2) Pajak Subjektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

- a) Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran serta pengajuan banding kepada majelis pertimbangan pajak (MPP).

- b) Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c) Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d) Syarat Finansial (Pemungutan pajak harus efisien) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e) Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.

## **6. Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak secara umum sebagai pedoman dalam menentukan peraturan dan menjalankan proses pemungutan pajak. Setiap negara mempunyai asas pemungutan pajak yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya ada 3 asas penting yang menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan ketentuan terkait pajak diantaranya :

a) Asas kebangsaan

Pemungutan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan mempunyai arti setiap orang atau wajib pajak yang lahir serta tinggal didalam negeri mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tanggungan pajaknya dengan ketentuan dan aturan yang telah berlaku.

b) Asas Sumber

Pedoman pemungutan pajak menyesuaikan dengan tempat tinggal dari pihak wajib pajak, maupun lokasi sebuah perusahaan berdiri. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Domisili

Asas domisili biasa disebut juga sebagai asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan dengan menyesuaikan tempat tinggal atau domisili seseorang. Asas pemungutan pajak ini berlaku terhadap setiap wajib pajak yang berada dalam sebuah negara.

## **7. Teori – teori yang mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:3-4) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain :

- 1) Teori Asuransi adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, dimana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.
- 2) Teori Kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya, jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.
- 3) Teori Daya Pikul adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu ;
  - a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

- 4) Teori Bakti Dasar, teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan teori ini negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.
- 5) Teori Asas Daya Beli teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

#### **8. Reformasi perpajakan**

Reformasi perpajakan merupakan perubahan mendasar di segala bidang perpajakan. Reformasi perpajakan yang terfokus saat ini ditujukan untuk memodernisasi perpajakan dalam jangka menengah (3-6 tahun) dan pada awalnya bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, tingginya tingkat kepercayaan terhadap perpajakan. Ketiga, produktivitas petugas pajak yang tinggi (Yayak Heriyanto & Nila Sari, 2021). Reformasi perpajakan berarti memperbaiki atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik perorangan, kelompok, maupun organisasi, agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Reformasi perpajakan mengacu pada peningkatan kinerja individu organisasi dan lembaga secara lebih efisien, ekonomis, dan cepat dalam urusan perpajakan secara umum, dimana modernisasi perpajakan

diperlukan, seperti pada era sistem perpajakan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Reformasi perpajakan dimulai tahun 1983 yakni sistem perpajakan berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment* Ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sementara otoritas perpajakan mengemban fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. *Kedua*, reformasi perpajakan Jilid I pada 2002 – 2008 yang difokuskan pada perbaikan sumber daya manusia (SDM), organisasi, dan proses bisnis. Reformasi ini mencakup modernisasi kantor pajak dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan Pratama. Selain itu, melakukan segmentasi WP dalam memberikan pelayanan dan pengawasan agar lebih efektif serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP dan kepercayaan masyarakat. "Dalam rangka meningkatkan produktivitas aparat pajak, dilakukan penguatan SDM, pengawasan internal dan memperkenalkan kode etik pegawai DJP. *Ketiga*, reformasi perpajakan jilid II pada tahun 2009 – 2016 dengan fokus pada kemudahan berusaha (*business friendly*) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pasca krisis global. Pada periode tersebut, pemerintah memberikan berbagai kebijakan insentif/fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan. Upaya ini diterbitkan untuk mendukung daya beli masyarakat yang waktu itu terhantam saat krisis global. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha dan menarik investor dari luar negeri. *Keempat*, reformasi perpajakan tahun 2016 hingga saat ini. Dalam reformasi ini



mencakup lima pilar penting dalam perpajakan yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi.

## **9. Modernisasi Perpajakan.**

### **a) Pengertian modernisasi perpajakan.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah proses perubahan sikap dan pemikiran masyarakat agar dapat hidup sesuai dengan kebutuhan masa kini. Arti lainnya dari modernisasi adalah pemodernan. mengacu pada pencatatan, komunikasi, dan pengarahannya informasi yang berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai misi utama, dengan tujuan menyediakan informasi dan tersedia kembali bila diperlukan kegiatan akuntansi dan termasuk pengarsipan surat dan lain-lain. Direktorat jenderal pajak telah merilis sebuah program reformasi perpajakan yang dimana reformasi tersebut yang berupaya memberikan pelayanan yang efisien, profesional, dan adil dalam pelaksanaannya. Apabila program modernisasi ini dilakukan secara berkelanjutan maka akan membawa perubahan dalam kepatuhan pajak (Ferdilia et al., 2022). Modernisasi dapat dipengaruhi oleh 4 dimensi (Rahayu, 2020).

1. Struktur organisasi adalah elemen yang terkait dengan pola peran yang telah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan pada subunit yang terpisah, pembagian wewenang di antara manajer, dan jaringan komunikasi formal seperti Pemahaman Fungsi pelayanan dan pemeriksaan, Pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan Sistem pelaporan secara rutin.

2. Prosedur organisasi berhubungan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan layanan, sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman proses organisasi didasarkan pada aktivitas organisasi yang rutin dilakukan seperti: Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, Inovasi proses dan Perubahan metode operasi dan informasi.
3. Strategi organisasi. mengacu pada taktik, sikap, dan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan semua keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses dan aman, Seperti Dukungan teknologi informasi modern, pengambilan keputusan berdasarkan *Standar Operating Procedure*, dan Ketentuan perpajakan yang berlaku meliputi hukum, keadilan, dan kesederhanaan.

Budaya organisasi adalah sistem keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan menentukan perilaku para anggotanya. Seperti Menerapkan kode etik terhadap pegawai DJP, Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional dan penyempurnaan sistem manajemen SDMDalam pengembangan kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan pembaharuan terkait dengan beberapa aspek yang telah dikemukakan diatas baik mengenai ketepatan data dan mengenai informasi subjek maupun objek pajak Salah satu sistem informasi pertama kali yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berkesinambungan dengan Modernisasi perpajakan yaitu Sistem Perpajakan Terpadu (SAPT), kemudian dilakukan pembaharuan kembali menjadi Sistem informasi Direktorat

Pajak (SIDJP). Sistem modernisasi perpajakan digunakan untuk mendukung modernisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, maka dilakukan pembaharuan sistem perpajakan dengan mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-System. Adapun beberapa e-System yang dapat dipergunakan Wajib pajak yaitu e-Registration, SPT, e-Filing, dan e-Billing. (Lubis & Pratama, 2023).

b) Tujuan Modernisasi Perpajakan

Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut :

- 1) Menekankan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh wajib Pajak.
- 2) Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Mengembangkan konsep tata kelola yang baik, transparansi, tanggung jawab, keadilan dan akuntabilitas, meningkatkan kinerja fiskus dan mempublikasikan pendapat yang jelas mengenai pengeluaran dan penggunaan pajak.
- 4) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi
- 5) Meningkatkan penegakan hukum pajak.
- 6) Meningkatkan pengawasan yang tinggi dalam melaksanakan pajak, baik pada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

Reformasi perpajakan berarti memperbaiki atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik perorangan, kelompok, maupun

organisasi, agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Reformasi perpajakan dapat dikatakan berhasil, apabila dibutuhkan, penyederhanaan struktur perpajakan demi kemudahan, kepatuhan dan pengendalian kebutuhan untuk mengembangkan strategi reformasi yang tepat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, serta karyawan Direktorat Jenderal Pajak bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional.

Penerapan modernisasi perpajakan adalah penerapan sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat dimana merupakan perwujudan dari program kegiatan reformasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa penerapan modernisasi perpajakan dilakukan tak lain hanya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.

Penerapan tersebut mencakup 4 dimensi yaitu :

- a) Perubahan Struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak (KPP)

Struktur organisasi adalah elemen yang terkait dengan pola peran yang telah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan pada sub unit

yang terpisah, pembagian wewenang di antara manajer, dan jaringan komunikasi formal. Struktur organisasi yang diterapkan dalam sistem perpajakan modern merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan mempengaruhi proses-proses yang melayani Wajib Pajak, dan dalam pelaksanaannya Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala kegiatan perpajakan. Struktur organisasi diharapkan mampu memperbaiki regulasi perpajakan (Ferdilia et al., 2022).

b) Prosedur organisasi.

Proses organisasi berhubungan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan layanan, sosialisasi, dan karir. Pembahasan dan pemahaman proses organisasi didasarkan pada aktivitas organisasi yang rutin dilakukan seperti perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, Inovasi proses dan perubahan metode operasi dan informasi. Prosedur organisasi adalah perbaikan administratif pada pemberian layanan dan model audit yang selaras dengan persyaratan hukum. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah melalui pemanfaatan teknologi elektronik seperti; E-SPT, E-Faktur, E-Filing, E-Billing, E-Registration dan E-Counseling. Sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ferdilia et al, 2022).

c) Strategi organisasi.

Strategi organisasi mengacu pada taktik, sikap, dan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan semua keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses dan aman, Seperti Dukungan teknologi informasi modern, Pengambilan keputusan

berdasarkan *Standar Operating Procedure* dan Ketentuan perpajakan yang berlaku meliputi hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Strategi organisasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penerapan sosialisasi digital, serta mengurangi ketertinggalan dan tingkat kesalahan pelaporan Surat pemberitahuan tahunan (SPT) sehingga meningkatkan tanggung jawab wajib pajak (Pertiani & Saladin, n.d.-a)

d) Budaya organisasi.

Budaya organisasi adalah sistem keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan menentukan perilaku para anggotanya. Seperti Menerapkan kode etik terhadap pegawai DJP, Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional, Melakukan penyempurnaan sistem manajemen SDM. Adanya budaya organisasi yang berpacu pada penerapan kode etik pegawai yang ketat, organisasi untuk menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*). Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petugas pajak dan memotivasi mereka untuk berperilaku bersih dan adil. Hal ini menjadi langkah awal komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam melayani masyarakat agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan tenang tanpa takut disalahgunakan. Bentuk unit pelayanan diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakannya (Hidayat et al., n.d.)

10. Kepatuhan Pajak

**1). Pengertian kepatuhan pajak.**

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak menaati seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat ditentukan oleh kepatuhan dalam mendaftarkan wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang belum dibayar, serta keratan dalam keterlambatan pembayaran. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan terjadi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban perpajakan meliputi pendaftaran, penghitungan dan pembayaran pajak yang belum dibayar, pelunasan tunggakan, dan penyampaian kembali pemberitahuan. Kepatuhan seringkali dikaitkan dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Kepatuhan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, dan wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya serta membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu (Risa & Sari., 2018)

Adapun Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia (2010:139) adalah:

- a) Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah keadaan dimana seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Kepatuhan Material adalah berarti kepatuhan wajib pajak secara substansial atau substansial terhadap seluruh peraturan perpajakan yang

bersifat material sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

## **2). Kriteria kepatuhan wajib pajak**

Ketentuan Umum Perpajakan membenarkan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dijadikan acuan Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK 03/2021 yang mengatur tentang pengembalian kelebihan pajak yang bersifat sementara kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2021. Adapun standar kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Ferdilia et al, 2022)

- a) Ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan semua
- b) jenis pajak selama tiga tahun terakhir.
- c) Tidak menunggak pajak jenis apa pun kecuali mempunyai izin untuk menunda angsuran atau pembayaran pajak.
- d) Laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor atau otoritas pengawas keuangan negara dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- e) Belum pernah dihukum karena kejahatan perpajakan dalam lima tahun terakhir.

## **3). Indikator kepatuhan wajib pajak**

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang



ketentuan umum dan tata cara perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan mukhlis (2012:103) antara lain dapat dilihat dari:

- a) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesedian membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggukan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- d) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan modernisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Adapun beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini sebagai berikut

**Tabel 2 1**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian

1.	Pertiani K, Saladin H (2021)	Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Metode kualitatif deskriptif	Modernisasi sistem perpajakan pada KKP Pratama Palembang Seberang Ulu dimana dinilai sudah baik dilihat dari perubahan : 1. Modernisasi Struktur organisasi 2. Modernisasi prosedur organisasi 3. Modernisasi strategi organisasi 4. Modernisasi budaya organisasi
2.	Jeni Ferdilia, Emma Lilianti, Nurmala (2022)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Palembang Ilir Timur	Metode Kuantitatif Tipe Asosiatif Kausal	Indikator Modernisasi sistem perpajakan modern: 1. Struktur organisasi dinilai efektif pada Kpp pratama palembang Ilir timur. 2. Prosedur organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Strategi organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.	Leonardus Danang Novanto Sukoyo, Muhammad Sopiya (2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022)	Metode Kuantitatif	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dalam uji F (simultan), modernisasi sistem administrasi perpajakan administrasi dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Hasil pengolahan data secara parsial menunjukkan modernisasi administrasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
4.	Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, Yuniati/2019	Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Metode Kuantitatif	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Henny Zurika	Pengaruh Modernisasi Administrasi	Metode Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis data

	Lubis, M.Arief Hidayat/ 2019	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah)		menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu $7,329 > 1,984$ sehingga hipotesis diterima, artinya bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak
6.	Rieke Pernamasa ri dan Syifa Nur Rahmawati (2021)	Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan variabel struktur organisasi dan implementasi good governance berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan
7.	Adnan Ghazi Asra, Dudi Pratomo/2021	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating	Metode Kuantitatif	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

8.	Kristin Pertiani, Hendry Saladin, Jusmani	Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)	Metode Kuantitatif	Modernisasi Administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.
9.	Rumela, Ni Ketut Nia /2022	Pengaruh Sistem administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Metode Kuantitatif	Sistem administrasi perpajakan modern dan pelayanan pegawai pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak KPP Pratama Denpasar Timur.
10.	Mardianto, Ahmad (2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah	Metode Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

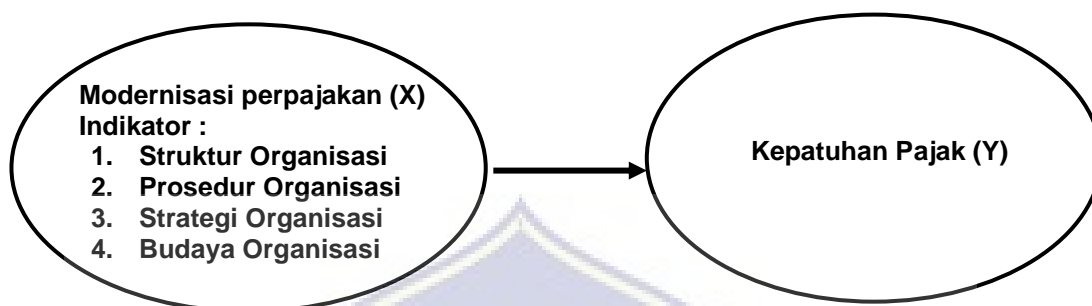
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Reva Maria Valianti, Yasir Arafat, Ema Merliana (2021) pada kantor pelayanan pajak

pratama Palembang Seberang Ulu dengan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian survei. Sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni Ferdilia, Emma Lilianti, Nurmala (2022) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Palembang Ilir Timur jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan hasil penelitian modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dimana indikator prosedur dan strategi organisasi tidak efektif pada kantor pelayanan pajak pratama di Palembang Ilir Timur. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yang sama, perbedaan penelitian ini terletak pada KPP yang berbeda serta dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif dan regresi linier berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana.

### **C. Kerangka Pikir.**

Kerangka pikir adalah sesuatu yang diuraikan dalam tinjauan pustaka atas dasar teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka pikir pada dasarnya berupaya menggambarkan himpunan hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk memiliki kerangka berpikir yang mendalam, tidak boleh menarik kesimpulan hanya dari fakta atau potongan informasi yang dapat diamati. Berikut ini gambaran terkait dengan Modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 2 1**  
**Kerangka Pikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah istilah ilmiah yang digunakan dalam konteks kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah berpikir normal (Sugiyono, 2011). Hipotesis adalah bagian terpenting dalam penelitian yang harus terjawab sebagai kesimpulan penelitian itu sendiri. Hipotesis bersifat dugaan, karena itu peneliti harus mengumpulkan data yang cukup untuk membuktikan bahwa dugaannya benar. Hipotesis dibedakan atas dua jenis yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima (Lolang, 2019).

#### **Modernisasi Perpajakan terhadap Peningkatan kepatuhan pajak**

Modernisasi perpajakan merupakan salah satu langkah yang diterapkan oleh direktorat jenderal pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak, modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Berbagai perubahan dalam reformasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama reformasi perpajakan diantaranya tercapainya tingkat

kepatuhan wajib pajak yang tinggi, tercapainya kepercayaan wajib pajak terhadap pajak dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Konsep perpajakan di Indonesia disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada, modernisasi perpajakan dilakukan pada dasarnya meliputi Restrukturisasi organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan Budaya organisasi. Beberapa dasar modernisasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan seperti yang telah diteliti oleh (Pertiani & Saladin, 2021) dengan judul "Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Perpajakan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu" membuktikan bahwa penerapan modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh penerapan modernisasi perpajakan yang telah memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anita primastiwi dan ratih dwi c, 2021 menyimpulkan bahwa modernisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris yang datanya berupa angka-angka, dimana selanjutnya akan diolah dengan menggunakan rumus kerja statistik dengan alat ukur tertentu seperti skala nominal, ordinal, interval dan rasio (Indrawan & Yaniawati, 2016). Sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dimana berdasarkan *Purposive sampling* (Kriteria tertentu) sedangkan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden.

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bulukumba yang merupakan suatu badan yang bergerak pada bidang pelayanan perpajakan yang bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92514. Waktu penelitian kurang lebih dua bulan April – juni 2024.

#### **C. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah peniliti. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek ataupun subjek yang memiliki kerakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (V Wiratana Sujarweni, 2014). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba yaitu sebesar 5.371 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih sehingga menjadi unit dalam penelitian. Sample juga sebagian atau wakil dari populasi yang diambil berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu yang dianggap mampu menjadi perwakilan populasi secara menyeluruh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Non probability Sampels ing dengan pendekatan Purposive sampling. Purposive Sampling merupakan cara pengambilan sampel tidak secara acak melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba, sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

- n : Ukuran Sampel yang dicari  
 N : Ukuran Populasi  
 e : Nilai *margin of error* 10% (0.1) dari ukuran populasi.

Ukuran Sampel yang dicari:

$$n = \frac{5.371}{1 + 5.371 (0.1)^2}$$

$$n = 98.17$$

Jadi, sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu 98 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba.

#### D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penyebaran Kuesioner. Kuesioner merupakan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disusun secara teliti. Kuesioner berisi daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti dan akan diisi oleh responden. Kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1). Bagian pertama berisi tentang pertanyaan menyangkut identitas responden.
- 2). Bagian kedua berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan modernisasi perpajakan.

Pendapat responden menggunakan kuesioner menggunakan skala likert.

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 3 1**

**Item Skor Responden**

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4

Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### E. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

#### 1). Variabel Independen (bebas)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan, modernisasi perpajakan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah :

4. Struktur organisasi adalah elemen yang terkait dengan pola peran yang telah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan pada subunit yang terpisah, pembagian wewenang di antara manajer, dan jaringan komunikasi formal seperti Pemahaman Fungsi pelayanan dan pemeriksaan, Pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan Sistem pelaporan secara rutin.
5. Prosedur organisasi berhubungan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan layanan, sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman proses organisasi didasarkan pada aktivitas organisasi yang rutin dilakukan

seperti: Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, Inovasi proses dan Perubahan metode operasi dan informasi.

6. Strategi organisasi. mengacu pada taktik, sikap, dan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan semua keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses dan aman, Seperti Dukungan teknologi informasi modern, pengambilan keputusan berdasarkan *Standar Operating Procedure*, dan Ketentuan perpajakan yang berlaku meliputi hukum, keadilan, dan kesederhanaan.
7. Budaya organisasi adalah sistem keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan menentukan perilaku para anggotanya. Seperti Menerapkan kode etik terhadap pegawai DJP, Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional dan penyempurnaan sistem manajemen SDM.

## **2). Variabel Dependen (terikat)**

Menurut Sugiyono (2019:69) “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau pelaku usaha yang beroperasi di suatu negara namun ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan keadilan sistem perpajakan.(Muniroh et al., 2019). Kepatuhan perpajakan merupakan

suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, termasuk dalam penyampaian dan pelaporan SPT. Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu Pendaftaran wajib pajak, Pelaporan SPT, Perhitungan pajak, Pembayaran pajak, Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, Kebijakan publik, Kebijakan fiskal, Kebijakan perpajakan.

**Tabel 3 2**  
**Definisi Operasional Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Variabel Independen (X) Modernisasi Perpajakan	Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan struktur Organisasi KPP atas dasar fungsi.</li> <li>2. Pembagian tugas dan wewenang antar KPP</li> <li>3. <i>Account Representative</i> pada KPP mampu membantu dan menangani permasalahan perpajakan</li> </ol>
	Prosedur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi proses Melakukan Proses Registrasi NPWP</li> <li>2. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT</li> <li>3. Kecepatan pelayanan fiskus</li> <li>4. Kualitas pelayanan fiskus</li> </ol>
	Strategi Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi</li> <li>2. Pembayaran secara online</li> <li>3. Penggunaan E- System</li> </ol>
	Budaya Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban fiskus untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugasnya</li> <li>2. Kewajiban Fiskus dalam memberikan</li> </ol>

		<p>elayanan kepada wajib pajak sebaik-baiknya dan sesuai dengan bidangnya masing – masing</p> <p>3. Kewajiban fiskus untuk bersikap jujur, transparan, lugas, dan profesional dan dapat dipercaya.</p>
Variabel Dependen Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan Untuk Mendaftarkan Diri	1. Kemudahan memperoleh NPWP
	Kepatuhan Untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	<p>1. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT</p> <p>2. Adanya keterlibatan pelayanan fiskus dalam membantu melaporkan SPT</p>

#### F. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan menggunakan teknik statistik berupa aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). SPSS merupakan software yang digunakan untuk menganalisis maupun menggambarkan data yang telah diperoleh dari jawaban responden terkait dengan bagaimana penerapan modernisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bulukumba..

##### 1. Uji Kualitas Data

Kualitas data merupakan serangkaian tindakan yang menentukan apakah data dapat dipahami secara independen untuk dapat digunakan kembali. Penggunaan kembali data berarti bahwa para peneliti asli atau peneliti lain dapat menggunakan data pada waktu mendatang tanpa menentukan apa yang mungkin digunakan secara spesifik. Uji Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item dalam pertanyaan dari kuesioner telah diungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti. Uji validitas dilakukan untuk menjelaskan bahwa data yang telah ditentukan akurat dasar pengambilan keputusan yaitu:

- 1). Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  Maka variabel ataupun item pertanyaan dinyatakan valid.
- 2). Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  Maka variabel ataupun item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas berarti dapat dipercaya” Artinya, instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrumen dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas *Alpha Cronbach's* adalah sebagai berikut:

- 1). Jika *Alpha Cronbach's*  $> 0.06$  maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten



- 2). Akan tetapi, Jika nilai *Alpha Cronbach's*  $< 0.06$  maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu berdistribusi normal dapat dilakukan dengan pengujian *Kolmogorov Smirnov*. *Kolmogorov smirnov* adalah uji statistis yang digunakan untuk memeriksa kenormalan dari data sampel yang diberikan. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.)  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) jika nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$  maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

### 2). Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka model regresi tersebut termasuk

homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka model regresi termasuk heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas variabel independen  $< 0,05$  maka terjadi Heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai probabilitas variabel independen  $> 0,05$  maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### G. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan uji hipotesis apakah terdapat hubungan antara variabel independen yaitu modernisasi perpajakan (X) dengan variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana dapat digunakan untuk menentukan pola hubungan antara satu variabel independen (X) dengan variabel independen (Y) dengan nilai kritis yang digunakan 0,05 atau 5%, adapun persamaan dari regresi linier sederhana yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- X = Modernisasi Perpajakan
- b = Koefisien regresi Uji hipotesis
- e = Kesalahan pengganggu (*standard error*)

Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji signifikan yaitu menggunakan uji sebagai berikut :

1). Uji pengaruh parsial (Uji t).

Uji statistik t atau pengujian regresi secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan taraf signifikan level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung jika t hitung lebih besar dari t tabel ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau probabilitas lebih kecil dari signifikan ( $\text{sig.} < 0,05$ ), maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2). Analisis koefisien determinasi ( $R_2$ )

koefisien determinasi ( $R_2$ ) adalah salah satu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R_2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh persentase (%) pengaruh variabel independen (X) yang mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 jika

- a)  $R_2 = 0$  berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

- b)  $R_2 =$  mendekati 0 berarti lemahnya variabel independen terhadap variabel dependen.
- c)  $R_2 =$  mendekati 1 berarti kuatnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah KPP Pratama Bulukumba**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba pada awalnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang mulai beroperasi pada tahun 2005 yang merupakan pecahan dari KPPBB Bantaeng. Dasar pendirian KPPBB Bulukumba adalah: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, Dan V dan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan No. 519/KMK.01/2003. Kepala kantor pertama dan satu-satunya dari KPPBB Bulukumba adalah Bapak Agus Budianto yang memimpin sejak Saat Mulai Operasi (SMO) pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

KPPBB Bulukumba berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba pada tahun 2008 di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut wilayah kerja KPP Pratama Bulukumba mencakup tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menjalankan tugas administratifnya KPP Pratama Bulukumba membawahi dua Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut:

- a. KP2KP Sinjai untuk wilayah Kabupaten Sinjai
- b. KP2KP Benteng untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

KPP Pratama Bulukumba sudah lima kali berganti kepala kantor definitif sejak kantor ini berdiri sampai dengan sekarang. Berikut adalah riwayat kepemimpinan KPP Pratama Bulukumba. Pertama adalah Bapak Agus Budiarto yang memimpin mulai dari kantor ini berdiri, sejak masih menjadi KPPBB Bulukumba dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Abd. Azis Toraha dari periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Herman mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Periode selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Sofian yang memegang tongkat komando KPP Pratama Bulukumba mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Terakhir, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang kepemimpinan KPP Pratama Bulukumba dipegang oleh Bapak Mulyana.

## **2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba**

### **1. Visi**

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"

### **2. Misi**

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba adalah sebagaimana Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bulukumba



**Gambar 3 1**

#### **Struktur organisasi KPP Pratama Bulukumba**

#### 4. *Job Description*

Dalam menjalankan Fungsinya, KPP Pratama Bulukumba mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Unit organisasi yang memiliki tugas antara lain:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan

registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping)

subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

## **B. Karakteristik Responden**

Karakteristik komposisi responden yang digunakan untuk melengkapi penelitian meliputi Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, dan masa Kepemilikan NPWP. Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba, serta banyaknya responden yang diperoleh yaitu 98 Responden. Adapun Tabel yang akan

memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait Karakteristik komposisi responden yang menjadi data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan komposisi jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4 1**

#### **Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase %</b>
1.	Laki – Laki	39	39.8%
2.	Perempuan	59	60.2%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer diolah 2024*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden jenis kelamin berjumlah 98 orang, yang diantaranya jenis kelamin laki – laki berjumlah 39 orang dengan persentase sebesar 39.8% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 59 orang dengan persentase 60.2%. Sehingga dengan melihat karakteristik jenis kelamin tertinggi adalah jenis kelamin perempuan dan karakteristik jenis kelamin terendah adalah Laki – laki.

#### 2. Karakteristik berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan Usia sebagai berikut:

**Tabel 4 2**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Presentase %
1.	21 – 30 tahun	34	34.7%
2.	31 – 40 tahun	32	32.7%
3.	41 – 50 tahun	24	24.5%
4.	Diatas 50 Tahun	8	8.2%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer diolah 2024*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden berdasarkan karakteristik Usia berjumlah 98 Orang, yang diantaranya terdiri dari kelompok Usia 20 – 30 tahun berjumlah 30 orang dengan persentase 30.6%, kelompok usia 31 – 40 tahun berjumlah 35 orang dengan persentase 35.7%, selanjutnya kelompok usia 41 – 50 tahun berjumlah 25 orang dengan persentase 25.5%, dan terakhir kelompok Usia diatas 50 Tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 8.2%. Berdasarkan karakteristik responden menurut usia dapat dikatakan bahwa karakteristik usia responden tertinggi yaitu usia 21 – 30 tahun dan karakteristik usia responden terendah adalah 50 tahun.

### 3. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4 3****Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	SMA	18	18.4%
2.	S1	71	72.4%
3.	S2	3	3.1%
4.	Lain – lainnya	6	6.1%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden berdasarkan karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan berjumlah 98 Orang diantaranya ialah kelompok tingkat pendidikan SMA berjumlah 18 orang dengan persentase 18.4%, Kelompok tingkat pendidikan S1 berjumlah 71 Orang dengan persentase 72.4%, Tingkat pendidikan S2 berjumlah 3 orang dengan persentase 3.1% sedangkan tingkat pendidikan lain – lainnya berjumlah 6 orang dengan persentase 6.1%. Maka karakteristik tingkat pendidikan responden tertinggi yaitu S1 dan tingkat pendidikan responden terendah S2.

4. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan sebagai berikut:

**Tabel 4 4****Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55	56.1%
2.	Karyawan	8	8.2%
3.	Wirausaha	11	11.2%

4.	Lain – lainnya	24	24.5%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden berdasarkan karakteristik Pekerjaan berjumlah 98 Orang, diantaranya ialah kelompok pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 54 orang dengan persentase 55.1%, kelompok pekerjaan Karyawan berjumlah 9 orang dengan persentase 9.2%, kelompok pekerjaan wirausaha berjumlah 10 orang dengan persentase 10.2% dan kelompok pekerjaan lainnya berjumlah 25 dengan persentase 25.5%. Berdasarkan karakteristik responden menurut pekerjaan dapat dikatakan bahwa karakteristik pekerjaan responden tertinggi yaitu usia Pegawai negeri Sipil (PNS) dan karakteristik pekerjaan responden terendah adalah Karyawan.

#### 5. Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan Masa kepemilikan NPWP sebagai berikut:

**Tabel 4 5**

#### **Karakteristik Responden berdasarkan masa kepemilikan NPWP**

No	Masa Kepemilikan	Jumlah	Presentase %
1.	1 – 5 Tahun	59	60.2%
2.	5 – 10 tahun	39	39.8%
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dengan masa kepemilikan NPWP berjumlah 98 orang, yang diantaranya masa kepemilikan 1 – 5 tahun berjumlah 59 orang dengan persentase sebesar 60.2% dan masa kepemilikan NPWP 5 – 10 tahun berjumlah 39 orang dengan persentase 39.8%. Sehingga dengan melihat karakteristik masa kepemilikan NPWP tertinggi adalah masa kepemilikan 1 – 5 tahun dan masa kepemilikan NPWP terendah adalah masa kepemilikan 5 – 10 tahun.

### C. Uji Kualitas Data

Uji Kualitas data dalam ini dilakukan dua uji yaitu Uji Validitas data dan Uji Reabilitas data. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden telah sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan akan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang mencakup 25 pertanyaan yang disebar kepada responden. Adapun jumlah sampel ( $n$ ) = 98 responden dan besarnya *Degree of Freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$  sehingga diperoleh ( $df$ ) = 96, taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 sehingga diperoleh  $r$  tabel yaitu 0,1986. Uji validitas kuesioner ini dapat diukur dengan teknik *Pearson Correlation* dimana kriteria instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai  $r$



hitung > r tabel (0,1986) serta nilai korelasi [sig. (2-tailed)] < taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Hasil Uji Validitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4 6**  
**Hasil uji validitas Modernisasi Perpajakan (X)**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
Modernisasi perpajakan (X)	X <sub>1.1</sub>	0.482	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.402	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.444	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.441	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.473	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>2.1</sub>	0.427	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.389	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.516	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.395	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.344	0.1986	0.001	Valid
	X <sub>3.1</sub>	0.450	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0.386	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0.453	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0.410	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0.402	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>4.1</sub>	0.421	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>4.2</sub>	0.440	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>4.3</sub>	0.412	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>4.4</sub>	0.556	0.1986	0.000	Valid
	X <sub>4.5</sub>	0.482	0.1986	0.000	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

**Tabel 4 7**  
**Hasil uji validitas Kepatuhan pajak(Y)**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
	Y <sub>1.1</sub>	0.616	0.1986	0.000	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0.688	0.1986	0.000	Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0.657	0.1986	0.000	Valid
	Y <sub>1.4</sub>	0.610	0.1986	0.000	Valid
	Y <sub>1.5</sub>	0.561	0.1986	0.000	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel bernilai signifikan berada dibawah 0,05 dan nilai r hitung  $> 0,1986$ . Sehingga hasil menunjukkan bahwa seluruh instrumen atau pertanyaan di setiap variabelnya terbukti Valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Beberapa teknik dapat digunakan untuk menghitung indeks reliabilitas salah satu yang digunakan yaitu *Alpha Cronbach*. Pada uji *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ). Suatu data atau kuesioner dapat dikatakan Reliabel jika nilai *Alpha Cronbach*  $> 0,60$ . Perhitungan koefisien *Alpha Cronbach* dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil uji Reliabilitas sebagai berikut:

**Tabel 4 8**

**Hasil uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Modernisasi perpajakan (X)	0.775	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.613	Reliabel

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *Alpha Cronbach* dari seluruh variabel X dan Y dimana nilai Variabel X 0.775 dan variabel Y 0.613 lebih besar dari 0.60 dengan demikian data penelitian ini adalah Reliabel.

## D. Analisis Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas.

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf kesalahan ( $\alpha = 0.05$ ) 5%. Jika Nilai Signifikan  $>$  dari taraf kesalahannya maka data berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4 9

#### Hasil uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		98
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.67539566
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.051
	<i>Positive</i>	.042
	<i>Negative</i>	-.051
<i>Test Statistic</i>		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* 0.200  $>$  0.05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu

pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dan residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berikut ini tabel uji Heteroskedastisitas :

**Tabel 4 10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Modernisasi perpajakan (X)	0.694	Bebas heteroskedastisitas

*Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.*

Hasil pengujian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa Variabel independen nilai signifikansi nya  $0.694 > 0.05$ . dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### **E. Analisis Statistik Deskriptif.**

Analisis Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data secara umum seperti nilai rata – rata (Mean), nilai tertinggi (Maximum), nilai terendah (Minimum) dan standar deviasi dari masing – masing variabel yaitu Modernisasi perpajakan (X) dan Kepatuhan Pajak (Y). Uji statistik Deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4 11**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Perpajakan(X)	98	71	100	84.31	5.140
Kepatuhan Pajak (Y)	98	14	25	21.12	1.922

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan tabel 4.11 dimana Variabel Modernisasi Perpajakan (X) dengan nilai minimum 71, nilai maximum 100, nilai rata - rata 84.31 serta Standard Deviation 5.140. selanjutnya untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y) dengan nilai minimum 14, nilai maximum 25, nilai rata – rata 21.12 dan standard deviation 1.922.

1. Analisis deskriptif Variabel Modernisasi Perpajakan (X)
  - a. Indikator Perubahan Struktur Organisasi.

Indikator perubahan struktur organisasi terdapat 5 pernyataan yang diajukan kepada responden adapun tabel Analisis Deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 4 12**  
**Analisis Deskriptif Perubahan Struktur Organisasi**

Item	Jawaban Responden										Rata – Rata
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>1.1</sub>	0	0	1	1.0	6	6.1	68	69.4	23	23.5	4.15
X <sub>1.2</sub>	0	0	0	0	3	3.1	57	68.4	28	28.6	4.25
X <sub>1.3</sub>	0	0	0	0	11	11.2	58	59.2	29	29.6	4.18
X <sub>1.4</sub>	0	0	0	0	16	16.3	51	52.0	31	31.6	4.15
X <sub>1.5</sub>	0	0	0	0	9	9.2	63	64.3	26	26.5	4.17
Total Rata – Rata											20.91

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.12 mengenai jawaban responden terkait indikator perubahan struktur organisasi terdiri dari 5 pertanyaan dengan total Rata - Rata untuk Indikator perubahan Struktur organisasi 20.91 Dimana Pernyataan yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 4.25 pada item X<sub>1.2</sub> Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu 4.15 pada item X<sub>1.1</sub> dan X<sub>1.4</sub>.

b. Indikator Perubahan Prosedur Organisasi.

Indikator perubahan prosedur organisasi terdapat 5 pernyataan yang diajukan kepada responden adapun tabel Analisis Deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 4 13**  
**Analisis Deskriptif Prosedur Organisasi**

Item	Jawaban Responden										Rata - Rata
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>2.1</sub>	0	0	0	0	6	6.1	70	71.4	22	22.4	4.16
X <sub>2.2</sub>	0	0	0	0	6	6.1	61	62.2	31	31.6	4.26
X <sub>2.3</sub>	0	0	0	0	12	12.2	59	60.2	27	27.6	4.15
X <sub>2.4</sub>	0	0	0	0	5	5.1	63	64.3	30	30.6	4.26
X <sub>2.5</sub>	0	0	0	0	11	11.2	59	60.2	28	28.6	4.17
Total Rata – Rata											21.00

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.13 mengenai jawaban responden terkait indikator perubahan Prosedur organisasi terdiri dari 5 pertanyaan dengan total Rata - Rata untuk Indikator Prosedur organisasi 21.00 Dimana Pernyataan yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 4.26 Pada Item X<sub>2.4</sub> dan X<sub>2.2</sub>. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu 4.15 pada item X<sub>2.3</sub>.

c. Indikator Perubahan Strategi Organisasi.

Indikator perubahan strategi organisasi terdapat 5 pernyataan yang diajukan kepada responden adapun tabel Analisis Deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 4 14**  
**Analisis Deskriptif Strategi Organisasi**

Item	Jawaban Responden										Rata - Rata
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>3.1</sub>	0	0	0	0	8	8.2	62	63.3	28	28.6	4.20
X <sub>3.2</sub>	0	0	1	1.0	7	7.1	62	63.3	28	28.6	4.19
X <sub>3.3</sub>	0	0	0	0	10	10.2	55	56.1	33	33.7	4.23
X <sub>3.4</sub>	0	0	0	0	7	7.1	66	67.3	25	25.5	4.18
X <sub>3.5</sub>	0	0	0	0	17	17.3	49	50.0	32	32.7	4.15
Total Rata – Rata											20.97

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.14 mengenai jawaban responden terkait indikator perubahan Strategi organisasi terdiri dari 5 pertanyaan dengan total Rata - Rata untuk Indikator Prosedur organisasi 21.00 Dimana Pernyataan yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 4.23 Pada Item X<sub>3.3</sub>. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu 4.15 pada item X<sub>3.5</sub>.

d. Indikator Perubahan Budaya Organisasi.

Indikator perubahan Budaya organisasi terdapat 5 pernyataan yang diajukan kepada responden adapun tabel Analisis Deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 4 15**  
**Analisis Deskriptif Budaya Organisasi**

Item	Jawaban Responden					Rata - Rata
	STS	TS	N	S	SS	

	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X <sub>4.1</sub>	0	0	0	0	4	4.1	67	68.4	27	27.6	4.23
X <sub>4.2</sub>	0	0	1	1.0	3	3.1	61	62.2	34	34.7	4.32
X <sub>4.3</sub>	0	0	0	0	11	11.2	51	52.0	36	36.7	4.26
X <sub>4.4</sub>	0	0	1	1.0	8	8.2	47	48.0	42	42.9	4.33
X <sub>4.5</sub>	0	0	0	0	6	6.1	57	58.2	35	35.7	4.30
Total Rata – Rata											21.43

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.15 mengenai jawaban responden terkait indikator perubahan Budaya organisasi terdiri dari 5 pertanyaan dengan total Rata - Rata untuk Indikator Budaya organisasi 21.43 Dimana Pernyataan yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 4.33 Pada Item X<sub>4.4</sub>. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu 4.23 pada item X<sub>4.1</sub>.

## 2. Analisis deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Berdasarkan data yang telah diberikan kepada responden, terdapat 5 Pertanyaan terkait Kepatuhan Pajak, berikut tabel terkait item Jawaban Responden:

**Tabel 4 16**

### **Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak**

Item	Jawaban Responden										Rata – Rata
	STS		TS		N		S		SS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y <sub>1.1</sub>	1	1.0	0	0	5	5.1	58	59.2	34	34.7	4.27
Y <sub>1.2</sub>	1	1.0	0	0	4	4.1	64	65.3	29	29.6	4.22
Y <sub>1.3</sub>	0	0	0	0	14	14.3	54	55.1	54	55.1	4.16
Y <sub>1.4</sub>	0	0	0	0	6	6.1	64	65.3	28	28.6	4.22
Y <sub>1.5</sub>	0	0	0	0	8	8.2	58	59.2	32	32.7	4.24
Total Rata – Rata											21.12

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.



Berdasarkan Tabel 4.16 mengenai jawaban responden terkait Kepatuhan Pajak (X) terdiri dari 5 pertanyaan dengan total Rata - Rata untuk Indikator Kepatuhan Pajak (X) 21.12 Dimana Pernyataan yang memiliki nilai rata – rata tertinggi yaitu 4.27 Pada Item Y<sub>1.4</sub>. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata – rata terendah yaitu 4.23 pada item Y<sub>1.3</sub>.

## F. Metode analisis data

### 1. Pengujian Hipotesis.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana hanya melibatkan dua variabel yaitu Satu variabel Independen yaitu Modernisasi perpajakan dan Satu variabel Dependen yaitu kepatuhan pajak. Pengujian hipotesis dilakukan pada uji regresi linear sederhana dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05 atau 5%. Dasar keputusan Uji Regresi Linear Sederhana jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka variabel X berpengaruh terhadap Variabel Y. Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 4 17**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.655	2.810		2.013	.047

MODERNISAS I PERPAJAKAN	.183	.033	.490	5.515	.000
-------------------------------	------	------	------	-------	------

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.655 + 0.183X + 2.810$$

Persamaan di atas menunjukkan arti bahwa penerapan Modernisasi perpajakan dapat mempengaruhi Kepatuhan pajak dengan Asumsi sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta 5.655 dinyatakan bahwa variabel Independen Modernisasi perpajakan dianggap 0, maka dari itu variabel dependen Kepatuhan pajak sebesar 5.655.
2. Nilai beta menunjukkan nilai positif dimana Variabel Independen dan Variabel Dependen memiliki hubungan yang searah.
3. Koefisien Regresi Modernisasi perpajakan sebesar 0.183, menyatakan bahwa setiap kenaikan modernisasi perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkat kepatuhan pajak sebesar 0.183, sehingga modernisasi perpajakan berpengaruh positif.

## 2. Uji Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji Statistik t atau pengujian Parameter Individual dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen modernisasi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak. adapun hipotesis dalam penelitian ini yakni:

$H_a$  = terdapat pengaruh positif dan signifikan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

Untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel (1.660) maka  $H_a$  diterima artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi parameter individual sebagai berikut:

**Tabel 4 18**  
**Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.655	2.810		2.013	.047
MODERNISASI PERPAJAKAN X	.183	.033	.490	5.515	.000

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5.515 > 1.660$  sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima bahwa modernisasi perpajakan (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Berikut tabel hasil Uji koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 4 19**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 <sup>a</sup>	.241	.233	1.684

Sumber : Hasil olahan data SPSS diolah 2024.

Dari tabel 4.18 diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0.233 dimana hal ini dijelaskan bahwa Kepatuhan Pajak (Variabel Dependen) mampu dijelaskan oleh Modernisasi perpajakan (Variabel Independen) sebesar 23.3% sedangkan 76.7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun *Std. Error of the Estimate* sebesar 1.684 yang berarti semakin kecil angka ini membuat regresi semakin tepat dalam memprediksi Variabel Dependen.

#### **G. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Penerapan Modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Bulukumba.

Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan Kepatuhan pajak melakukan berbagai reformasi diantaranya terkait dengan Sistem Modernisasi perpajakan yang dimana diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas. Modernisasi Perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi perpajakan. Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanakannya *good governance* merupakan dasar dan konsep dari modernisasi perpajakan. Ada beberapa

indikator pendukung dalam modernisasi perpajakan di antaranya, Perubahan struktur organisasi serta sistem kerja Kantor pelayanan Pajak, Prosedur organisasi seperti perubahan pelayanan dan pemeriksaan, Strategi Organisasi seperti dukungan teknologi, dan Budaya Organisasi. seperti Penerapan kode etik terhadap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak.

Indikator pertama membahas tentang Struktur organisasi pada KPP Pratama Bulukumba berdasarkan hasil perolehan dari responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban Setuju dan Sangat setuju sebesar 84%, sedangkan untuk 16% lainnya menyatakan netral, dan tidak setuju dengan adanya indikator Struktur organisasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan adanya tanggapan positif yang diberikan responden terkait perubahan struktur organisasi maka dapat dikategorikan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa responden yang menyatakan netral dan tidak setuju dengan perubahan struktur organisasi pada KPP Pratama Bulukumba yang belum sepenuhnya dirasakan oleh responden.

Indikator Kedua terkait dengan prosedur organisasi pada KPP Pratama Bulukumba di peroleh hasil dari responden dimana responden memberikan tanggapan positif dengan kriteria jawaban Sangat setuju dan Setuju sebesar 84% sedangkan untuk 16% lainnya menyatakan netral dan tidak setuju. Dengan adanya tanggapan positif oleh responden maka indikator strategi organisasi yang mencakup perubahan metode pelayanan, dan perubahan metode operasi pada KPP Pratama Bulukumba dikategorikan sudah baik. Namun, ada beberapa responden yang mungkin

belum merasakan dampak dari perubahan prosedur organisasi ini sepenuhnya karena masih terdapat tanggapan yang netral.

Indikator ketiga yaitu Strategi Organisasi pada KPP Pratama Bulukumba. Peneliti memperoleh hasil dari responden yang memberikan tanggapan positif terkait dengan kriteria jawaban Sangat Setuju dan Setuju sebesar 84% sedangkan sisanya yaitu 16% responden memberikan tanggapan Netral dan Tidak setuju sehingga dengan banyaknya responden yang memberikan tanggapan positif terkait Strategi Organisasi khususnya pemanfaatan teknologi informasi modern yang digunakan oleh responden sebagian besar di kategorikan baik. Namun, masih terdapat responden yang menyatakan netral dan tidak setuju dengan Strategi organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi modern yang dirasa belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh responden.

Indikator keempat terkait dengan budaya organisasi pada KPP Pratama bulukumba dimana diperoleh hasil dari kriteria jawaban responden Setuju dan Sangat setuju sebesar 86% sedangkan sisanya yaitu 14% responden memberikan tanggapan netral dan tidak setuju dengan hal tersebut. Sehingga dengan banyaknya tanggapan positif terkait dengan budaya organisasi diantaranya terkait kode etik pegawai KPP Pratama bulukumba maka dikategorikan baik. Namun, masih terdapat beberapa responden yang menyatakan netral dan tidak setuju dengan budaya organisasi yang diterapkan oleh KPP Pratama Bulukumba.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan pada lingkungan KPP Pratama Bulukumba sebagian besar dalam kategori baik dari segi perubahan struktur organisasi Prosedur organisasi yang berkaitan dengan perubahan metode pelayanan dan perubahan metode operasi, strategi organisasi yang didukung oleh teknologi informasi modern dan budaya organisasi seperti penerapan kode etik pegawai kepada Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik pada KPP Pratama Bulukumba, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tanggapan positif yang diberikan responden dengan kriteria sangat setuju dan setuju sebesar 86%.

## 2. Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa Nilai Konstanta 5.655 dinyatakan bahwa variabel Independen Modernisasi perpajakan dianggap 0, maka dari itu variabel dependen Kepatuhan pajak sebesar 5.655. Nilai beta menunjukkan nilai positif dimana Variabel Independen dan Variabel Dependen memiliki hubungan yang searah. Koefisien Regresi Modernisasi perpajakan sebesar 0.183, menyatakan bahwa setiap kenaikan modernisasi perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkat kepatuhan pajak sebesar 0.183, sehingga modernisasi perpajakan berpengaruh positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil Uji Statistik ( Uji t) menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5.515 > 1.660$  sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima

bahwa modernisasi perpajakan (X) secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, nilai signifikansi t sebesar 0.000 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Hasil dari koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0.233 dimana hal ini dijelaskan bahwa Kepatuhan Pajak (Variabel Dependen) mampu dijelaskan oleh Modernisasi perpajakan (Variabel Independen) sebesar 23.3% sedangkan 76.7% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. Tingginya koefisien determinasi menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini menandakan bahwa Kepatuhan wajib pajak sebagian besar dipengaruhi oleh modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Melalui penerapan Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya serta pencapaian kepercayaan wajib pajak terhadap Pegawai pajak dapat lebih tinggi. Responden dalam penelitian ini mengungkapkan dalam kuesioner bahwa dengan adanya modernisasi perpajakan saat ini sangat memudahkan setiap wajib pajak yang akan melaporkan sehingga membuat wajib pajak semakin mudah selain itu sistem teknologi memudahkan wajib pajak serta kepercayaan akan pelayanan pajak yang diberikan oleh pegawai pajak kepada masyarakat juga akan meningkat karena akan sangat minim terjadinya kecurangan dan



pelayanan bersifat transparan, maka dari itu beberapa kemudahan tersebut menjadi alasan masyarakat akan kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan pendapat responden mengenai modernisasi perpajakan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Modernisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, apabila Kantor Pelayanan Pajak menerapkan sistem modernisasi dengan baik, maka dapat menjadi faktor yang penting untuk mencapai Kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Selain itu dengan adanya penerapan modernisasi perpajakan yang transparan dan akuntabel maka pemberian pelayanan sekaligus pengawasan secara insentif kepada wajib pajak dapat tercapai karena diterapkannya Sistem teknologi modern. Sehingga KPP dapat membentuk citra yang baik dengan memperoleh kepercayaan Wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana Fritz Heider yang menyatakan bahwa kekuatan internal (atribusi personal kemampuan dan usaha) dan kekuatan eksternal (atribusi lingkungan seperti aturan) keduanya bersama – sama menentukan perilaku manusia. Perilaku yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang berarti individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, modernisasi perpajakan ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka dari itu persepsi wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Hasil dari penelitian ini dimana

modernisasi perpajakan ini mempengaruhi kepatuhan pajak maka persepsi pajak dipengaruhi oleh kondisi secara eksternal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni Kristin (2021) yang menyimpulkan bahwa modernisasi perpajakan yang terdiri dari indikator Struktur organisasi, Prosedur organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Jeni Ferdilia (2022) dimana beberapa indikator diatas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak diantaranya ialah indikator Prosedur Organisasi dan Strategi organisasi. hal tersebut dikarenakan masyarakat masih sedikit yang menggunakan fasilitas teknologi modern.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap 98 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan sistem perpajakan di KPP Pratama Bulukumba sebagian besar dalam kategori baik yang meliputi: Struktur organisasi, Prosedur organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya organisasi. Dari hasil analisis menunjukkan variabel modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel modernisasi perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan pajak.

Hal ini berarti jika variabel modernisasi meningkat maka variabel kepatuhan pajak juga akan ikut meningkat dan apabila variabel modernisasi perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak akan ikut menurun. Sebelum di berlakukannya adanya Modernisasi Perpajakan tingkat kepatuhan pajak sangat menurun dikarenakan kesulitan wajib pajak dalam mengakses informasi yang telah diberlakukan oleh kantor pelayanan pajak, setelah adanya modernisasi perpajakan tingkat kepatuhan pajakpun meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi.

## B. SARAN

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, adapun saran yang peneliti sampaikan baik untuk peneliti selanjutnya maupun pihak yang berkepentingan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel Independen yaitu modernisasi perpajakan. Oleh karena itu, lebih baik apabila nantinya penelitian ini diperluas dengan menambah variabel - variabel lainnya yang berhubungan dengan hal – hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi seseorang yang akan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan modernisasi perpajakan salah satunya di lingkungan Fakultas ekonomi dan bisnis.
3. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai modernisasi perpajakan yang telah diterapkan oleh aparaturnya pajak dan memanfaatkan fasilitas sistem teknologi sebaik – baiknya sehingga meningkatnya penerimaan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). *Modernisasi Administraasi Perpajakan Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital* (Vol. 1, Issue 2).  
[Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)
- Amara Putri, D., & Ulfatun Najicha, F. (2021a). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–178.
- Amara Putri, D., & Ulfatun Najicha, F. (2021b). Reformasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–178.
- Bekasi, D. K., Risa, N., Rizky, M., & Sari, P. (2018). *Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 12(1), 20–37.
- Fathani Barra Alvin Faiz, A. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama*.
- Ferdilia, J., Lilianti, E., Akuntansi, N., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (N.D.-A). Pengaruh Sistem *Administrasi* Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Palembang Ilir Timur. In *Bongaya Journal Of Research In Accounting* (Vol. 5).
- Ferdilia, J., Lilianti, E., Akuntansi, N., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (N.D.-B). Pengaruh Sistem *Administrasi* Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Palembang Ilir Timur. In *Bongaya Journal Of Research In Accounting* (Vol. 5).
- Henny Zurika Lubis, H. Arief M. (1019). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Medan Petisah)*.

- Hidayat, K., Com, K., & Amanah, L. (N.D.). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (Jiam)*, 15(1). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Kurnia Rahayu, S. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. In *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 12, Issue 1).
- Lolang, E. (2014). *Hipotesis Nol Dan Hipotesis Alternatif* (Vol. 3).
- Lubis, N. I., & Pratama, A. (2023). Perkembangan Sistem *Administrasi Pajak* Berbasis Blockchain Blockchain Based Tax Administration System. *Januari*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.22303/accumulated.5.1.2023.27-41>
- Muhammad Imam Zuhdi, D. S. Y. (2019). *Pengaruh Modernisasi Sistem Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X*.
- Muniroh, H., Si, M., Zakky, M., Azizi, W., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Rembang, Y. (2019). Jurnal Akuntansi Indonesia 27 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final Pp Nomor 46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Rembang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final Pp Nomor 46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Rembang. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 8, Issue 1). [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com),

- Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).
- Pernamasari, R., & Syifa Nur Rahmawati, Dan. (2021). *Kembangan Jakarta* (Vol. 1, Issue 1).
- Pertiani, K., & Saladin, H. (N.D.-A). *Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kpp Pratama Seberang Ulu.*
- Pertiani, K., & Saladin, H. (N.D.-B). *Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kpp Pratama Seberang Ulu.*
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba. , A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi.*
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 7.* Salemba Empat.
- Robi Maulana M, D. Yulianti. (N.D.). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem *Administrasi* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka). 2022.
- Rusli, Y. M. (N.D.). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). [Http://Journal.Ubm.Ac.Id/](http://Journal.Ubm.Ac.Id/)
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). [Http://Journal.Ubm.Ac.Id/](http://Journal.Ubm.Ac.Id/)



- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2019). *Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.  
<https://doi.org/10.29407/Jae.V6i1.14750>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*.  
[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Surya, I., & Putra, P. (N.D.). *Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, D. A. (2020). Jurnal Politeknik Caltex Riau Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Di Kpp Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.  
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65.  
<https://doi.org/10.29313/Jra.V1i1.194>
- Yayak Heriyanto, & Nila Sari. (2021). *Pengaruh Good Governance, Reformasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat*.

L

A

M

P

I

R

A

N



### **Lampiran 1 Kuesioner Penelitian**

Kepada

Bapak/ Ibu Responden

KPP Pratama Bulukumba

Di tempat

Dengan hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa program studi Akuntansi (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar, Saya akan melakukan penelitian tentang **“PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK”** Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran.

Demikian permohonan atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

**Nia Wahyuni**

**Data Responden**

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Nama

=

Masa Kepemilikan NPWP

=

1 – 5 Tahun

5 – 10 tahun

Jenis Kelamin

=

L

P

Usia

=

Jenis pekerjaan

=

Tidak bekerja

PNS

Karyawan

Wirausaha

Lainnya mohon disebutkan (.....)

Tingkat Pendidikan

=

SMA

S1

S2

Lainnya mohon disebutkan (.....)

Bapak/ Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju



**A. Penerapan sistem perpajakan**

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator : Perubahan Struktur Organisasi</b>						
1.	Fiskus melayani saya dengan baik sesuai dengan struktur organisasi pada KPP dan atas dasar fungsi pekerjaan.					
2.	Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, fiskus memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.					
3.	<i>Account representative</i> pada KPP telah berjalan sebagaimana dengan mestinya dalam membantu menangani permasalahan perpajakan.					
4.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					
5.	Wajib Pajak diperhatikan secara mendalam, karena tiap aparat ( <i>Account Representative</i> ) menangani satu Wajib Pajak.					
<b>Indikator : Prosedur Organisasi</b>						
6.	Dalam melaksanakan proses registrasi NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) Menjadi lebih singkat dengan adanya penerapan sistem modern dengan berbasis digitalisasi ( <i>e-Registration</i> ).					
7.	Waktu yang diperlukan untuk melakukan pemrosesan SPT (Surat pemberitahuan Tahunan) menjadi lebih singkat dengan adanya Sistem modern (digitalisasi : <i>e-SPT, e-Filling</i> ).					
8.	Dalam melakukan proses pembayaran secara modern ( <i>e-Billing</i> ) menjadi lebih singkat setelah adanya penerapan sistem perpajakan modern.					
9.	Pelayanan fiskus menjadi lebih cepat dan meningkat setelah adanya penerapan sistem perpajakan modern.					
10.	Pelayanan fiskus menjadi lebih berkualitas dan meningkat setelah adanya penerapan sistem perpajakan modern.					
<b>Indikator : Strategi Organisasi</b>						
11.	Fiskus melayani saya dengan baik setelah adanya infastruktur yang mendukung dalam rangka pelayanan perpajakan					
12.	Pembayaran secara online ( tellerbank, internet banking, ATM ) memudahkan wajib pajak					
13.	Saya terbantu dengan adanya <i>e-SPT</i> dalam memudahkan saya untuk memenuhi kewajiban					

	perpajakan					
14.	Saya terbantu dengan adanya <i>e-Registration</i> Sebagai fasilitas pendaftaran dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.					
15.	Saya terbantu dengan adanya <i>e-Counselling</i> untuk memudahkan saya memperoleh informasi perpajakan					
<b>Indikator : Budaya Organisasi</b>						
16.	Fiskus memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak					
17.	Fiskus menghargai perbedaan Suku, agama, ras, dan adat istiadat orang lain dalam melakukan pelayanan kewajiban perpajakan					
18.	Fiskus memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan baik sesuai dengan bidang dan tugasnya masing – masing					
19.	Fiskus bersikap jujur, transparan, lugas, dan profesional serta dapat di percaya dalam melakukan pelayanan kewajiban perpajakan					
20.	Fiskus bersikap sopan dan terbuka dalam berhubungan dengan wajib pajak serta menghormati hak-hak wajib pajak.					

#### B. Kepatuhan wajib pajak

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa lebih mudah untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) setelah diterapkannya sistem perpajakan modern.					
2.	Pelayanan yang diberikan petugas pajak sudah cukup signifikan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT.					
3.	Saya menyampaikan SPT secara tepat waktu setelah diterapkannya sistem perpajakan modern					
4.	Kesadaran saya dalam membayar pajak meningkat setelah diterapkannya sistem perpajakan modern					
5.	Saya membayar pajak secara tepat waktu setelah diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern					

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

NO	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Masa kepemilikan NPWP	Struktur Organisasi					Prosedur organisasi					strategi organisasi					budaya organisasi					TOTAL X	Kepatuhan pajak					TOTALY		
							X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5			
1	Imam Ashari Sandi	Laki-Laki	21- 30 Tahun	Wirusaha	S1	1-5 tahun	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	77	4	4	4	4	3	19
2	Wildahayu	Perempuan	21- 30 Tahun	Wirusaha;	SMA	1-5 tahun	4	4	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	3	76	5	3	4	4	4	20	
3	Suryani ningsih	Perempuan	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	93	5	4	4	4	4	21	
4	Muh. Sarfandi	Laki-Laki	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	82	4	3	4	4	5	20	
5	Rahmat Hidayat	Laki-Laki	21- 30 Tahun	Wirusaha	S1	1- 5 Tahun	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	85	4	4	4	4	4	20	
6	ANDIAKSA, S.I.P	Laki-Laki	41- 50 Tahun	POLRI	S1	5- 15 Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	5	5	5	5	5	25	
7	Dermi	Perempuan	41- 50 Tahun	Wirusaha	SMA	5- 15 Tahun	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	92	4	4	4	4	4	20	
8	Baharuddin	Laki-Laki	41- 50 Tahun	PNS	S2	5- 15 Tahun	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	91	4	4	4	4	4	20	
9	Andi Sainuddin S Pd	Laki-Laki	>50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	88	5	5	5	4	4	23		
10	Andi Karman	Laki-Laki	41- 50 Tahun	Polri	SMA	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	83	5	4	4	4	4	21	
11	Muh Atlas L Rajamuddin	Laki-Laki	>50 Tahun	PNS	S3	5- 15 Tahun	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97	5	5	5	5	5	25	
12	Nurfuji Astuti	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	4	4	4	4	4	20	
13	ENDRIANY SYAN,S.Pd	Perempuan	41- 50 Tahun	Lain-lain	S1	1- 5 Tahun	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	89	4	4	4	4	4	20	
14	Rika	Perempuan	31-40 Tahun	PPPK	D3	5- 15 Tahun	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	91	5	5	5	4	5	24	
15	Syahrir	Laki-Laki	41- 50 Tahun	Wirusaha	SMA	5- 15 Tahun	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	80	4	4	5	4	4	21	
16	Lediana Rosa	Perempuan	21- 30 Tahun	Mahasiswa	S1	1- 5 Tahun	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	81	5	4	4	4	5	22	
17	Saenal, s	Laki-Laki	>50 Tahun	Petani	Smp	1- 5 Tahun	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	74	4	3	3	3	4	17	
18	Herman, s. Pd	Laki-Laki	31-40 Tahun	ASN P3K	S1	1- 5 Tahun	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84	4	4	4	4	4	20	
19	Rosdiana, S.Pd.I	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	4	4	4	4	4	20	
20	Nurseha, S.Pd	Perempuan	31-40 Tahun	ASN PPPK	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	83	4	4	4	4	4	20	
21	Roslina Mapparuru, S. Pd	Perempuan	>50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	4	4	4	4	4	20	
22	Sitti Salma Spd	Perempuan	>50 Tahun	Wirusaha	S1	1- 5 Tahun	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	84	4	5	4	5	4	22	
23	FAHMI	Laki-Laki	31-40 Tahun	PNS	S2	1- 5 Tahun	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	5	3	4	4	4	79	4	4	4	4	5	21	
24	HARFIDAH	Perempuan	41- 50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	4	4	4	4	4	20	
25	Rosma Yulianti	Perempuan	21- 30 Tahun	Wirusaha	S1	1- 5 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	80	4	4	4	4	4	20	
26	MUH. Said, S.Ag	Laki-Laki	41- 50 Tahun	Guru	S1	1- 5 Tahun	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	3	77	4	5	5	4	4	22		
27	ISMAIL BATAK S.Pd	Laki-Laki	41- 50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	78	4	4	4	5	5	22	
28	Rusma S.Pd	Laki-Laki	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	77	5	4	4	5	5	23		
29	Darmawati, SKM	Perempuan	41- 50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	5	4	4	4	4	5	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	84	4	4	4	5	5	22		
30	M. Subhan Syam, Amd.AK	Laki-Laki	>50 Tahun	PNS	D3	1- 5 Tahun	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	86	5	4	5	4	5	23	
31	Musdalifah, S.Kep.Ns	Perempuan	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	4	5	5	5	4	88	4	4	4	4	5	21	
32	Dasmawati, S.ST	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	3	4	3	4	3	3	4	4	81	4	4	5	5	5	23	
33	drg. Puji Rahayu	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	4	4	83	5	5	4	5	4	23	
34	Misba S.Kep.Ns	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	87	4	4	3	3	5	19	
35	Sri Armaya, Apt	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	5	4	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	86	5	4	4	4	4	21	
36	Ahriani, S.Kep	Perempuan	31-40 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	3	4	5	88	4	5	5	5	4	23		
37	Muh. Haris Sultan, S.K.M	Laki-Laki	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	83	4	4	5	4	4	21	
38	ABDUL RAHMAN, S.Kom	Laki-Laki	41- 50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	5	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	83	4	4	5	4	4	21	
39	Drs. Nurdin Usman, M.Kes	Laki-Laki	41- 50 Tahun	PNS	S2	5- 15 Tahun	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	5	4	86	5	4	4	4	5	22	
40	Tuti irawani	Perempuan	41- 50 Tahun	PNS	S1	5- 15 Tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	86	4	4	4	4	4	20	
41	Rikas pratwi	Perempuan	21- 30 Tahun	PNS	S1	1- 5 Tahun	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	86	4	4	4	4	4	20	
42	Erna efriliska	Perempuan	21- 30 Tahun	Ibu rumah tangga	S1	1- 5 Tahun	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	89	5	5	5	5	5	25	
43	FIRMAN, T. S. Pd	Laki-Laki	31-40 Tahun	Karyawan	S1	5- 15 Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	99	5	5	5	5	5	25	







Variabel Y (Kepatuhan Pajak)

Correlations							
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TOTALY
Y1.1	Pearson Correlation	1	.440**	0.188	0.024	0.150	.605**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.064	0.816	0.139	0.000
	N	98	98	98	98	98	98
Y1.2	Pearson Correlation	.440**	1	.317**	0.124	0.158	.676**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.001	0.224	0.121	0.000
	N	98	98	98	98	98	98
Y1.3	Pearson Correlation	0.188	.317**	1	.245*	0.162	.644**
	Sig. (2-tailed)	0.064	0.001		0.015	0.111	0.000
	N	98	98	98	98	98	98
Y1.4	Pearson Correlation	0.024	0.124	.245*	1	.228*	.539**
	Sig. (2-tailed)	0.816	0.224	0.015		0.024	0.000
	N	98	98	98	98	98	98
Y1.5	Pearson Correlation	0.150	0.158	0.162	.228*	1	.547**
	Sig. (2-tailed)	0.139	0.121	0.111	0.024		0.000
	N	98	98	98	98	98	98
TOTALY	Pearson Correlation	.605**	.676**	.644**	.539**	.547**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	98	98	98	98	98	98
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

2. Uji Reliabilitas

Modernisasi Perpajakan (X)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.613	5

Kepatuhan Pajak (Y)

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	98	100.0

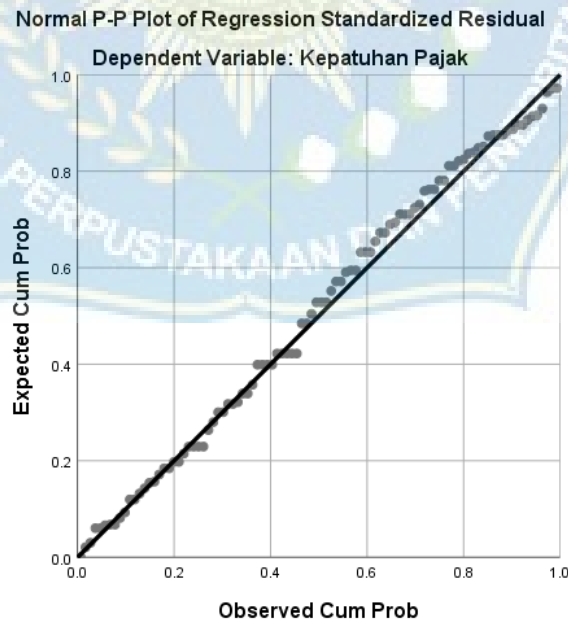
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.613	5

### 3. Uji Asumsi Klaisk

#### 1) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67539566
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.042
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		



## 2) Uji Heteroskedastisitas

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.147	1	.147	.155	.694 <sup>b</sup>
	Residual	90.656	96	.944		
	Total	90.802	97			
a. Dependent Variable: Abs_Res						
b. Predictors: (Constant), MODERNISASI PERPAJAKAN (X)						

## 4. Uji Hipotesis

### 1) Uji t

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 <sup>a</sup>	.241	.233	1.684
a. Predictors: (Constant), MODERNISASI PERPAJAKAN X				

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.256	1	86.256	30.413	.000 <sup>b</sup>
	Residual	272.274	96	2.836		
	Total	358.531	97			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK Y						
b. Predictors: (Constant), MODERNISASI PERPAJAKAN X						

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.655	2.810		2.013	.047
	MODERNISASI PERPAJAKAN X	.183	.033	.490	5.515	.000

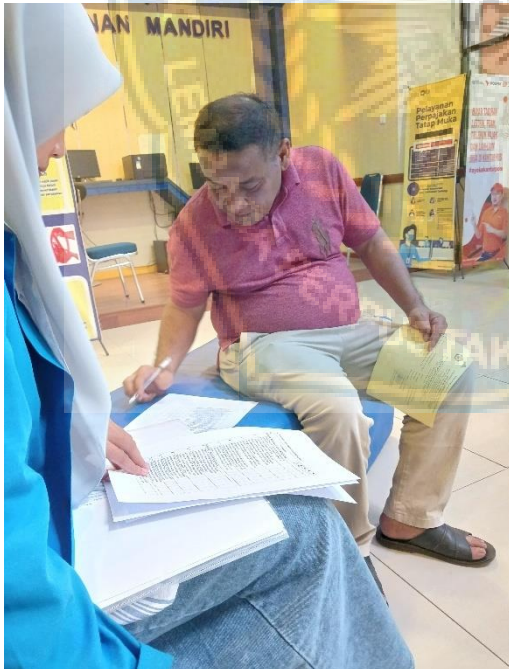
a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK Y

2) Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 <sup>a</sup>	.241	.233	1.684

a. Predictors: (Constant), MODERNISASI PERPAJAKAN X

Lampiran 4



Lampiran 5 Balasan Izn Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 182/DPMPTSP/IP/IV/2024**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari BAKESBANGPOL dengan Nomor: 074/0196/Batesbangpol/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : **NIA WAHYUNI**  
Nomor Pokok : **105731109320**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Jenjang : **S1**  
Institusi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Tempat/Tanggal Lahir : **BULUKUMBA / 2002-05-02**  
Alamat : **PADODO**

Jenis Penelitian : **Penelitian Kuantitatif**  
Judul Penelitian : **PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK BULUKUMBA**  
Lokasi Penelitian : **BULUKUMBA**  
Pendamping : **SAIDA SAID, SE.,M.Ak**  
Instansi Penelitian : **Kantor Pelayanan Pajak Bulukumba**  
Lama Penelitian : **tanggal 22 April 2024 s/d 22 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 22 April 2024



Kepala DPMPTSP  
Dra. Hj. Umrah Aswani, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
Nip : 19670304 199303 2 010



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT,  
DAN TENGGARA  
JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232  
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE  
0411-456132, 456857; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (O21)  
1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- Makassar,  
127/RISET/WPJ.15/2024 22 Mei  
2024  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Nia Wahyuni  
Dusun Padodo

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan  
Nomor Layanan: 02708-2024 pada 20 Mei 2024, dengan informasi:

NIM : 105731109320  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah  
Makassar  
Judul Riset : Pengaruh Modernisasi Perpajakan  
Terhadap Peningkatan Kepatuhan  
Pajak  
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit  
kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk  
melaksanakan Riset pada KPP Pratama Bulukumba, sepanjang data  
dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan  
tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan  
informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 22 Mei 2024 s/d 21 November 2024;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka D.I.R dapat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nia Wahyuni  
Nim : 105731109320  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 15 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurfitriani, S.Hum., M.I.P  
NBM. 964 591



**BAB I NIA WAHYUNI -  
105731109320**

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 15-Jul-2024 12:50PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2417082081  
**File name:** BAB\_I\_-\_2024-07-15T134934.977.docx (18.09K)  
**Word count:** 958  
**Character count:** 6837

BAB I NIA WAHYUNI - 105731109320

ORIGINALITY REPORT

<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	repository.ub.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	eprints.undip.ac.id Internet Source	<b>1%</b>



Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off



**Submission date:** 13-Jul-2024 10:11AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2415972670

**File name:** BAB\_II\_NIA\_WAHYUNI\_1.docx (138.16K)

**Word count:** 4402

**Character count:** 30441

## BAB II NIA WAHYUNI - 105731109420

### ORIGINALITY REPORT

**15%** SIMILARITY INDEX  
**16%** INTERNET SOURCES  
**7%** PUBLICATIONS  
**%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ojs.stiem-bongaya.ac.id">ojs.stiem-bongaya.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.beritasatu.com">www.beritasatu.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



**Submission date:** 15-Jul-2024 12:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2417082556

**File name:** BAB\_III\_-\_2024-07-15T134936.244.docx (26.76K)

**Word count:** 1887

**Character count:** 12432

### BAB III NIA WAHYUNI - 105731109320

#### ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id">etd.iain-padangsidempuan.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	Liem Aco, Serlina SM. "PENGARUH KUALITAS AIR MINUM TERHADAP PEMBELIAN ULANG KONSUMEN PADA DEPOT AIR MINUM FIKRI KABUPATEN TOLITOLI", JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2020 Publication	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	



		1%
9	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	1%
10	docobook.com Internet Source	<1%
11	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
12	thesis.binus.ac.id Internet Source	<1%
13	Novita Supriantikasari, Endang Sri Utami. "PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, EARNING PER SHARE DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Sektor Barang Konsumsi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)", Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2019 Publication	<1%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



# BAB IV NIA WAHYUNI - 105731109420

by Tahap Tutup

**Submission date:** 13-Jul-2024 10:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2415973158

**File name:** BAB\_IV\_NIA\_WAHYUNI\_1.docx (154.59K)

**Word count:** 5036

**Character count:** 31224

BAB IV NIA WAHYUNI - 105731109420

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX    **10%** INTERNET SOURCES    **2%** PUBLICATIONS    **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source		<b>8%</b>
<b>2</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source		<b>3%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  2%







**Submission date:** 15-Jul-2024 12:51PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2417082878  
**File name:** BAB\_V\_-\_2024-07-15T134937.181.docx (15.87K)  
**Word count:** 425  
**Character count:** 2797

BAB V NIA WAHYUNI - 105731109320

ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.binadarma.ac.id</b> Internet Source		<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>docobook.com</b> Internet Source		<b>2%</b>

Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off



## BIODATA PENULIS



**NIA WAHYUNI.** Dan akrab disapa Nia lahir di Kab bulukumba pada tanggal 02 Mei 2002 dari pasangan suami istri Tato Manai dan Indo Jua, Penulis adalah anak Kedua dari dua bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kompleks Hartaco Indah Blok 3R/12 Kab. Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu pada tingkat Sekolah Dasar di SDN 182 Dannuang dan lulus tahun 2014, Sekolah menengah pertama di SMPN 9 Bulukumba dan lulus di tahun 2017, dan tingkat sekolah menengah Atas di SMAN 1 Bulukumba dan lulus di tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan mengambil Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang, sampai saat di penghujung penulisan skripsi ini penulis masih berstatus terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.